

Kajian Analisa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi Pasca Era Reformasi

Ridho Irawan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ridhoirawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus korupsi dan bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) pada tahun 2004 – 2020, teknik analisa menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang menyebabkan kerugian terhadap negara yang cukup besar setiap tahunnya. Berdasarkan hasil uji variabel Indeks Persepsi Korupsi memiliki hubungan yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Saran yang dapat diberikan penulis pada penelitian ini adalah diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aliran uang negara dan penguatan akan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Kerugian Negara

1. PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia mempunyai tujuan yang sama yaitu memberi kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakatnya. Dalam proses mencapai kesejahteraan tidak hanya di dominasi oleh faktor ekonomi namun aspek sosial juga berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Peran dan fungsi pemerintah di setiap negara sebagai pembuat kebijakan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi berjalannya suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Kebijakan yang dibuat pemerintah sifatnya adalah menyangkut kepentingan banyak orang atau masyarakat dimana, kebijakan tersebut mempunyai tujuan dasar yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ekonomi fungsi pemerintah sangatlah besar, melihat sistem perekonomian sistem ekonomi indonesia adalah sistem ekonomi pancasila sehingga pemerintah harus mengatasi semua hal yang tidak dapat dibuat atau diselesaikan oleh swasta dan menjadi stabilisator dalam perjalanan ekonomi.

Korupsi merupakan tindakan seseorang atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Fenomena korupsi menjadi permasalahan yang banyak dihadapi oleh setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju. Penyebab utama terjadinya korupsi di berbagai negara adalah akibat dari lemahnya birokrasi dan penegakan hukum (Klitgaard, 2001). Secara ekonomi maraknya rent seeking dan tindakan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya hambatan perdagangan internasional, pengawasan harga oleh pemerintah, diberlakukannya multiple exchange rate, dan rendahnya gaji pegawai negeri (Ginting, 1999). Dampak akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas antara lain: terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi domestik/asing, penerimaan pajak, dan miss alokasi anggaran pemerintah yang membuat terhambatnya pembangunan ekonomi nasional setiap negara.

Mencermati kondisi Indonesia dalam perkembangannya, tampaknya korupsi tetap lestari atau bila boleh dikatakan sudah membudaya sejak lama, sehingga cenderung dianggap wajar para pelaku dalam melakukan korupsi, walaupun disisi lain dikatakan "korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat" (Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011 : 39). Walaupun berbagai upaya telah dilakukan baik melalui aturan hukum, pencerahan moral, dan sejenisnya untuk memberantas korupsi, tetapi kenyataannya korupsi tampaknya tetap lestari. Untuk meyakinkan bahwa korupsi telah mendarah daging di Indonesia perlu kiranya mengadakan penelusuran terhadap perjalanan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Ternyata pada jaman kerajaan sebutan tahta, harta dan wanita sudah saling bergandengan. Hal tersebut dapat diperkirakan sebagai faktor penyebab runtuhnya raja-raja pada jamannya. Seperti dikatakan bahwa "sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sri Wijaya, MajaPahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya" (Rahayu, 2013). Selanjutnya Mochtar Lubis dan James C. Scott (Indriana : 2013) bahwa "bahkan budaya korupsi sudah berakar dari orang-orang terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu pada birokrasi patrimonial dalam kerangka kekuasaan feodal" Korupsi pada jaman kerajaan merambah pada tataran dibawah raja, Sebagai pendukung pernyataan tersebut Rahayu (2013) mengemukakan

"Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korup dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung"

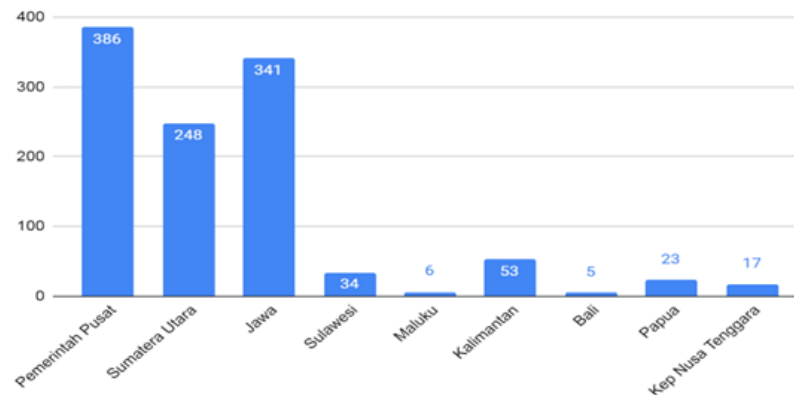
Perkembangan selanjutnya yaitu sesudah Indonesia merdeka budaya korupsi yang sudah mengakar dan mendarah daging justru bukannya menghilang tetapi tumbuh subur, para koruptor cenderung tidak jera untuk melakukan korupsi. Setelah merdeka masa transisi Indonesia terbagi menjadi 3 fase yaitu, Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi.

Sejarah membuktikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan oleh para penguasa, sejak Orde Lama. Berbagai upaya dan strategi sudah diupayakan dalam pemberantasan korupsi antara lain ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, munculnya lembaga anti korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, baik yang didirikan oleh Pemerintah, Lembaga perguruan tinggi, NGO maupun tokoh masyarakat. Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan dan badan anti korupsi ternyata tidak serta merta menjamin Indonesia terbebas dari praktik korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia seperti patah satu tumbuh seribu yang menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi darah daging dalam sistem negara Indonesia.

Kegagalan pemberantasan korupsi terlihat semakin jelas akibat dari dikeluarkannya berbagai peraturan yang sengaja dibuat untuk melindungi tindakan para koruptor agar terbebas dari jeratan hukum. Kegagalan pemberantasan korupsi di Orde Baru juga secara nyata belum melihat adanya strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif, sehingga penanganan yang dipraktekan seperti tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di sistem pemerintahan. Disamping itu, strategi pemberantasan korupsi yang dibuat tidak didasarkan oleh kebijakan yang jelas, yaitu kebijakan yang menitikberatkan pada upaya pencegahan potensi terjadinya korupsi birokrasi, tetapi lebih diwarnai oleh kepentingan politik jangka pendek.

Desentralisasi dan otonomi daerah pada era reformasi merupakan kebijakan yang diharapkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi secara optimal dan membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik serta angka korupsi mengalami penurunan, namun nyatanya itu tidak tercapai. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit "Virus Korupsi" yang sangat ganas. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dalam penyaluran dan pengalokasiannya, proses akuntabilitasnya di tingkat nasional dan tingkat daerah belum banyak dipublikasikan. Tingkat akuntabilitas yang rendah menyebabkan tendensi untuk korupsi cukup terbuka lebar.

Gambar 1. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004-2020



Dari data di atas dapat kita lihat bahwa tindak pidana korupsi saat ini sudah merambah ke berbagai lini baik pemerintah pusat maupun daerah. Dimana, berdasarkan data Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004-2020 peringkat pertama di tempati oleh Pemerintah Pusat terdapat 391 kasus, peringkat kedua di tempati oleh pulau Jawa dengan jumlah kasus sebanyak 341 kasus dan peringkat ketiga ditempati oleh pulau Sumatera dengan jumlah kasus sebanyak 248 kasus.

Banyaknya praktik korupsi yang terjadi merupakan bentuk kegagalan perencanaan pemerintah akibat dari kualitas institusi yang rendah sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional (Todaro & Smith, 2006). Selain itu kondisi negara yang belum stabil serta buruknya kualitas kelembagaan juga menyebabkan beberapa kebijakan dan aturan yang diterapkan dapat dibilang belum berjalan secara sempurna. Terdapat banyak negara berkembang di dunia dengan nilai indeks korupsi yang cukup rendah. Beberapa diantaranya terdapat di wilayah Asia tenggara seperti Indonesia.

Indeks persepsi korupsi (IPK) digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat korupsi di suatu negara dengan menggunakan skala 0 hingga 100, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup dan nilai 100 menunjukkan negara tersebut sangat bersih. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang mempunyai indeks persepsi korupsi rendah, yang artinya tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data di atas korupsi di Indonesia hingga saat ini masih cukup tinggi meskipun pada tahun 2016 – 2019 IPK Indonesia mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 IPK Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan IPK 37. Hal tersebut juga terlihat dari penurunan peringkat Indonesia secara global yaitu, pada 2019 Indonesia menduduki peringkat ke 85 dengan Indeks Persepsi Korupsi 40. Namun, pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan yaitu ke urutan 102 dengan IPK 37 (Transparency International, 2020).

Praktik korupsi ini telah terjadi di Indonesia sejak reformasi politik bergulir di Indonesia hingga pemerintahan saat ini. Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI), pada tahun 1999 memberi Indonesia predikat lima (5) besar negara paling korup di dunia. Hasil survei TI ini diulang kembali pada tahun 2004 dan hasil masih menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura .

Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengestimasi hubungan antar variabel variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang digunakan adalah tahun 2004 – 2020. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), *Transparansy International* (TI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Keuangan. Waktu penelitian ini direncanakan selama empat (3) bulan yang dimulai dari Juni sampai dengan Agustus 2021

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencatat data-data sekunder berupa dokumen atau file yang tersedia dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), *Transparansy International* (TI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Keuangan pada periode 2004 – 2018.

Penelitian ini mengenai dampak depresiasi kurs terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 16 tahun (dari tahun 2004 – 2020) , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model 1

$$PE_t = \alpha + \beta_1 IPK_t + \epsilon_t$$

Dimana :

PE = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan %

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

t = Unit Waktu (2004 - 2018)

KRPt = Indeks Persepsi Korupsi

ϵ_t = *term of error*

2. Model 2

$$JKK_t = \alpha + \beta_1 PE_t + \beta_2 GE_t + \beta_3 IN_t + \epsilon_t$$

Dimana :

JKKt = Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia

PE = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan %

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

t	= Unit Waktu (2006 - 2018)
GEt	= Pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah
INT	= Penanaman Modal Dalam Negeri %
TKDt	= Transfer daerah dalam satuan rupiah
ϵt	= <i>term of error</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Indonesia

1) Kondisi Geografis Indonesia

Kondisi Geografis Secara astronomis , Indonesia terletak antara 6° 08" Lintang Utara dan 11° 15" Lintang Selatan dan antara 94° 45" – 141° 05" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Berdasarkan posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Negara Australia dan Samudra Hindia
- Barat : Samudra Hindia
- Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.910.931,32 km² dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504. Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Merauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Merupakan sebuah Negara yang memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT.

Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Adapun 34 provinsi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
- Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
- Kepulauan Bangka Belitung terdiri Kepulauan Bangka Belitung
- Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- Pulau Sulawesi terdiri Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
- Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

2) Kondisi Demografi Indonesia

Penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 266.927.712 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 976.811 per tahun. Jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta penduduk dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020). Populasi jenis kelamin penduduk Indonesia di tahun 2018 adalah sebesar 133.084.082 jiwa penduduk laki-laki atau 49,9 % dan sebesar 133.842.630 jiwa penduduk perempuan atau 50,1 %.

Menurut proyeksi BPS tahun 2010-2025 diperkirakan jumlah penduduk sesuai kelompok umur 0-14 tahun adalah 2,7 persen, umur 15-59 tahun adalah 18,9 persen, sedangkan umur 60 tahun keatas adalah 86,8 persen. Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia yaitu 60 tahun keatas. Pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur 0-14 tahun tumbuh negatif 3,6 persen, umur 15-59 tahun tumbuh 25,9 persen, dan umur 60 tahun keatas tumbuh 167,2 persen. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,1 tahun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 69,1 tahun.

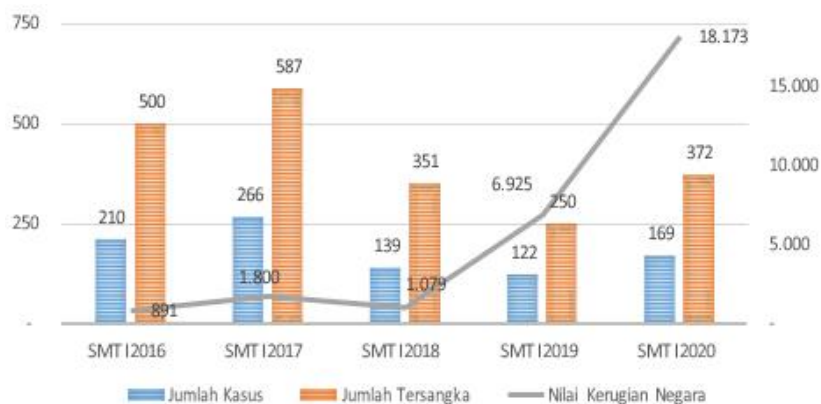
Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 3,52% dari penduduk dunia. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Jakarta Pusat dengan jumlah 889.448 penduduk per 47,90 km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi di Tidore Kepulauan (Maluku Utara) dengan jumlah 78.025 penduduk per 9.564,70 km².

Gambaran Umum Korupsi di Indonesia

1) Tren Perkembangan Korupsi di Indonesia

Perkembangan tindak pidana korupsi tidak pernah terlepas dari negara Indonesia. Dimana, setiap tahun kasus korupsi di Indonesia tidak pernah habis dan cenderung mengalami peningkatan. Untuk melihat bagaimana tren perkembangan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Gambar 1. Perbandingan Kasus Korupsi Semester I 2016 – Semester I 2020



Berdasarkan grafik penanganan korupsi di atas dapat dilihat bahwa di atas diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya selalu berada di atas angka 100 kasus terlihat data di atas tahun 2016 jumlah kasus korupsi sebanyak 210 dan kemudian mengalami peningkatan menjadi 266 kasus di tahun 2017. Meskipun di tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan kasus korupsi menyentuh

kasus sebanyak 122 di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kasus korupsi cukup mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 169.

Apabila dilihat dari jumlah tersangka juga berbanding lurus dengan kasus korupsi dimana jumlah tersangka menyentuh angka tertinggi yaitu 587 tersangka di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018 – 2019 dengan jumlah 250 tersangka di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 372 tersangka. Selanjutnya, dari sisi kerugian negara mengalami peningkatan kerugian yang sangat signifikan setiap tahunnya terlihat dari tahun 2018 mengalami kerugian sebanyak 1.07 Triliun terus mengalami kenaikan di tahun 2019 dengan nilai kerugian sebesar 6.92 Triliun Hingga pada tahun 2020 mengalami kerugian mencapai 18.17 Triliun Rupiah.

2) Korupsi Berdasarkan Sektor

Pemetaan korupsi berdasarkan sektor dilakukan untuk mengetahui sektor mana saja yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 30 sektor yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan data ICW, sektor yang paling rentan dan sering terjadi tindak pidana korupsi adalah sektor Anggaran Desa dimana terdapat 44 Kasus atau sekitar 26% kasus korupsi berada pada sektor Anggaran Desa. Pada sektor Anggaran desa jumlah kasus korupsi yang terjadi adalah sebanyak 44 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp. 16,6 Miliar. Selain sektor Anggaran desa, sektor yang memiliki kasus terbanyak adalah sektor pemerintah dan pertahanan dimana masing – masing sektor terdapat 13 kasus dengan nilai kerugian pada sektor pemerintah sebesar Rp. 18,2 Miliar dan sektor pertahanan sebesar Rp. 36,3 Miliar. Namun, apabila kita lihat dari besara kerugian negara sektor yang paling merugikan negara adalah sektor transportasi dengan memberi kerugian negara sebesar Rp. 809,9 Miliar dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus korupsi. Selanjutnya, di ikuti oleh sektor perbankan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 254,2 Miliar dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus korupsi dan di ikuti oleh sektor pertahanan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 36,3 Miliar dengan jumlah kasus sebanyak 13 kasus korupsi.

3) Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana perkembangan tindak pidana korupsi di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak adalah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 17 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Ro. 61,4 Miliar. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah kasus terbanyak yaitu provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 16 Kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 139,2 Miliar dan di ikuti oleh provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 kasus korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp. 24,5 Milliar. Namun, apabila kita lihat dari nilai kerugian negara akibat korupsi provinsi Riau menempati urutan pertama dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 497,5 Miliar dan di ikuti oleh provinsi Jawa Timur dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 139,2 Miliar. Selanjutnya, diikuti oleh provinsi Maluku dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 65,9 Miliar.

4) Korupsi Berdasarkan Lembaga

Pemetaan korupsi berdasarkan lembaga ini menyasar pada lembaga yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi. Analisis ini bertujuan untuk memperlihatkan tentang perkembangan korupsi pada setiap lembaga lembaga.

Tabel 1. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Rugi
1	Pemerintah Kabupaten	62	Rp 605,8 Miliar	Rp 10,6 Miliar
2	Pemerintah Desa	53	Rp 21,4 Miliar	-
3	Pemerintah Kota	11	Rp 64,5 Miliar	-
4	Badan Usaha Milik Negara	9	Rp 17,3 Miliar	-
5	Badan Usaha Milik Daerah	9	Rp 140,2 Miliar	Rp 45 Juta
6	Pemerintah Provinsi	7	Rp 11,1 Miliar	-
7	BPPT	4	-	Rp 300 Juta
8	Badan Lembaga Negara	3	Rp 1 Miliar	Rp 400 Juta
9	Badan Usaha Milik Desa	3	Rp 420 Juta	-
10	Bumiputera	3	Rp 6,5 Miliar	-
11	Kementerian	2	Rp 300 Juta	-
12	Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	1	Rp 2 Miliar	-
13	Pengadilan	1	Rp 100 Juta	-
14	Sekolah Tinggi/Universitas	1	Rp 1,4 Miliar	-
TOTAL		149	Rp 148,1 Triliun	Rp 20,7 Miliar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu Pemerintah Kabupaten dengan total kasus sebanyak 62 kasus dan merugikan negara sebesar Rp. 605,8 Miliar. Pada peringkat kedua lembaga yang paling banyak ditemukan kasus korupsi adalah Pemerintahan Desa dengan total kasus sebanyak 53 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 21,4 Miliar dan peringkat ketiga ditempati oleh Pemerintahan Kota dengan total kasus sebanyak 11 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 64,5 Miliar.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat di tingkat kabupaten belum optimal. Banyaknya kasus yang terjadi di tingkat daerah menjadi catatan merah bagi Kementerian Dalam Negeri Sebagai Lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kurang optimalnya pengawasan dari pihak terkait menjadi pintu masuk bagi setiap orang yang memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil Analisis Regresi

Hasil Regresi Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil regresi pertama, ditemukan masalah bahwa secara parsial ada variabel bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi karena memiliki nilai prob/signifikan lebih besar dari pada 0,15 ($\alpha > 15\%$). Namun regresi tersebut menghasilkan Adjusted R-Squared yang tinggi yaitu sebesar 0,129465, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat rendah.

Hasil Regresi MultiKolinearitas

Hasil uji menunjukkan nilai Centered VIF Variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), maka artinya bahwa dalam hasil regresi di atas tidak terjadi multikolinieritas. Namun, karena dalam regresi ini terdapat variabel yang tidak signifikan, maka dilakukan pengujian kembali dengan cara logaritma natural (LN) dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Regresi Logaritma Natural Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil uji logaritma natural, terdapat variabel bebas yang memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,1368 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 15\%$ (0,15%). Berdasarkan dari hasil regresi yang telah dilogaritma ternyata nilai probability variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) signifikan maka dilakukan pengujian selanjutnya yaitu multikolinieritas sebagai berikut.

Hasil Regresi Multi Kolonearitas

Hasil uji menunjukkan nilai Centered VIF Variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), maka artinya bahwa dalam hasil regresi di atas tidak terjadi multikolinieritas. Karena tidak terjadi multikolinearitas, maka dilakukan pengujian heteroskedestitas dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Regresi Heteroskedestitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai p value yang ditujukan dengan nilai prob.Chi Square(1) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,2328. Oleh karena itu p value $0,2328 > 0,15$ berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi heterokedastisitas.

Hasil Regresi Variabel Jumlah Kasus Korupsi

Dari hasil regresi pertama, ditemukan masalah bahwa secara parsial ada variabel bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Yaitu variabel TKDD memiliki nilai prob/signifikan lebih besar dari pada 0,1 yaitu 0.7444 atau ($\alpha > 15\%$) dan variabel Pengeluaran Pemerintah (GE) memiliki nilai prob/signifikan lebih besar dari pada 0,1 yaitu 0.9552 atau ($\alpha > 15\%$). Namun regresi tersebut menghasilkan Adjusted R-Squared yang tinggi yaitu sebesar 0,801434, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi.

Hasil Regresi Multikolonearitas Variabel Jumlah Kasus Korupsi

Hasil uji di atas menunjukkan nilai Centered VIF Variabel Pengeluaran Pemerintah (PE), Investasi (IN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lebih besar dari 10 ($VIF > 10$), maka artinya bahwa dalam hasil regresi di atas terjadi multikolinieritas. Karena dalam regresi ini terdapat variabel yang tidak signifikan dan multikolinearitas, maka dilakukan pengujian kembali dengan melakukan logaritma natural (LN).

Hasil Regresi Logaritma Natural Variabel Jumlah Kasus Korupsi

Dari hasil uji logaritma natural, tidak terdapat satupun variabel bebas yang memiliki nilai yang signifikan $\alpha < 15\%$ (0,15%). Berdasarkan dari hasil regresi yang telah dilogaritma ternyata tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai probability yang signifikan. Karena dalam regresi ini terdapat variabel yang tidak signifikan, maka dilakukan pengujian kembali dengan menghilangkan salah satu variabel yaitu variabel TKDD.

Hasil Regresi Variabel Jumlah Kasus Korupsi dengan Menghilangkan Satu Variabel

Dari hasil regresi dengan menghilangkan variabel TKDD, ditemukan masalah bahwa secara parsial terdapat satu variabel bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Jumlah Kasus Korupsi (KPK) yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah (PE) dengan prob/signifikan sebesar 0.6964 atau nilai prob/signifikan lebih besar dari pada 0,15 ($\alpha > 15\%$). dan variabel lainnya yaitu variabel Investasi (IN) memiliki nilai prob/signifikan yaitu 0.0037 lebih kecil dari pada 0,15 ($\alpha > 15\%$) dan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai prob/signifikan yaitu 0.0058 lebih kecil dari pada 0,15 ($\alpha > 15\%$). Namun regresi tersebut menghasilkan Adjusted R-Squared yang tinggi yaitu sebesar 0,81, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi dan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Regresi Logaritma Natural Variabel Jumlah Kasus Korupsi

Dari hasil uji logaritma natural, tidak terdapat satupun variabel bebas yang memiliki nilai yang signifikan $\alpha < 15\%$ (0,15%). Berdasarkan dari hasil regresi yang telah dilogaritma ternyata tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai prob-

ability yang signifikan. Karena dalam regresi ini terdapat variabel yang tidak signifikan, hasil regresi yang digunakan adalah hasil regresi yang pertama tanpa menggunakan uji logaritma natural dan kemudian dilakukan uji Multikolinearitas sebagai berikut.

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Jumlah Kasus Korupsi dengan Menghilangkan Satu Variabel

Hasil uji menunjukkan nilai Centered VIF Variabel Pengeluaran Pemerintah (PE), Investasi (IN) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) lebih besar dari 10 ($VIF > 10$), maka artinya bahwa dalam hasil regresi di atas terjadi multikolinieritas. Karena dalam regresi ini tidak terdapat variabel yang tidak signifikan dan multikolinearitas, maka dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Heteroskedastisitas Variabel Jumlah Kasus Korupsi dengan Menghilangkan Satu Variabel

Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai p value yang ditujukan dengan nilai prob.Chi Square(3) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,1558. Oleh karena itu p value $0,1558 > 0,15$ berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi di atas penelitian ini menggunakan regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi yang sudah di Logaritma Naturalkan pada model I, dan regresi variabel JKK dengan menghilangkan satu variabel pada model II, hal ini dikarenakan dari seluruh rangkaian regresi yang telah dilakukan Hasil regresi terub yang mendekati nilai BLUE walaupun tidak sempurna.

1) Penaksiran Korelasi (R)

Dari hasil regresi pada model I yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang sudah di logaritma natural, diperoleh nilai R sebesar 0.1511102, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 0.1511102. Dari hasil regresi model II yaitu Jumlah Kasus Korupsi (JKK) yang sudah dihilangkan satu variabel, diperoleh R sebesar 0.857663, artinya bahwa derajat keeratan antar variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0.857663

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien Determinasi (R Square) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi pertama yaitu variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (PE) setelah dilakukan logaritma natural dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.151102, artinya secara Bersama sama Variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 15.11%. Sedangkan 84.49% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada disturbance error term.

2) Interpretasi Hasil

Dari hasil regres pada model variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan menggunakan logaritma natural, maka model pertama adalah sebagai berikut.

$$PE_t = \alpha_0 + \alpha_1 IPK_t + \varepsilon_t$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$$PE = 2.309218 - 0.181552 IPK_t + \varepsilon_t$$

Koefisien $\alpha_0 = 2.309218$, artinya jika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak ada atau = 0 maka Pertumbuhan Ekonomi ditahun t sebesar 2.3 %.

Koefisien $\alpha_1 = 0.181552$, artinya jika nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari selama 1 tahun meningkat sebesar 1, maka angka Pertumbuhan Ekonomi turun sebesar 0.18% tahun.

Pada Model II dari hasil regresi model variabel Jumlah Kasus Korupsi (JKK) dengan menghilangkan salah satu variabel, maka model kedua adalah sebagai berikut.

$$JKK_t = \alpha_0 + \alpha_1 PE_t + GE_t + IN_t + \varepsilon_t$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$JKK_t = -40.79687 + 11.18133_1 PE_t - 0.017345 GE_t + 0.000467 IN_t + \varepsilon_t$
 Koefisien $\alpha_0 = -40.79687$, artinya jika variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pengeluaran Pemerintah (GE), Investasi (IN) tidak ada atau = 0 maka Jumlah Kasus Korupsi ditahun t sebesar 40.79 kasus.

Koefisien $\alpha_1 = 11.18133$, artinya jika nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) selama 1 tahun meningkat sebesar 1%, maka angka Jumlah Kasus Korupsi naik sebesar 11.18 kasus.

Koefisien $\alpha_2 = -0.017345$, artinya jika nilai Pengeluaran Pemerintah (GE) selama 1 tahun meningkat sebesar Triliun, maka angka Jumlah Kasus Korupsi turun sebesar 0.017 kasus.

Koefisien $\alpha_3 = 0.000467$, artinya jika nilai Investasi (IN) selama 1 tahun meningkat sebesar 1 Triliun, maka angka Jumlah Kasus Korupsi turun sebesar naik sebesar 0.00046 kasus.

3) Konstanta dan Intersep

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi Jumlah Kasus Korupsi (JKK), terdapat nilai konstanta sebesar yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata Jumlah Kasus Korupsi berkecenderungan turun ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

Investasi (IN)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel Investasi (IN) adalah sebesar 0.000467, dimana variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Jumlah Kasus Korupsi (JKK). Nilai probability dari variabel Investasi (IN) adalah sebesar 0,0037 (< 0,10), artinya benar jika terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Investasi (IN) terhadap variabel Jumlah Kasus Korupsi (JKK).

Pengeluaran Pemerintah (PE)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 11.18133, dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK). Nilai probability dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah 0.0058 (<15%). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara Jumlah Kasus Korupsi (JKK) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pengeluaran Pemerintah (GE)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah (GE) adalah dimana variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK). Nilai probability dari Pengeluaran Pemerintah (GE) adalah sebesar 0.6964 (> 15%). Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang positif antara Pengeluaran Pemerintah (GE) dengan Jumlah Kasus Korupsi (JKK).

4) Uji Statistik

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel Investasi (IN), Pengeluaran Pemerintah (PE), Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK). Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai dengan cara $df (n)-k = 10 - 4 = 6$ dengan ($\alpha=10\%$) maka nilai sebesar 1,94318.

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan autoregressive variabel Investasi (IN), Pengeluaran Pemerintah (PE), Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK) memiliki nilai probability (F statistic) sebesar 0,000058 dan nilai F statistic sebesar 22.09383. Maka dengan nilai ini dapat disimpulkan bahwasanya variabel independent Bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

5) Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model pertama dan kedua tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa).

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model pertama setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji logaritma natural satu variabel dan diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.6011993, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Pada model kedua setelah dilakukan pengujian dengan menghilangkan salah satu variabel dan diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.397277, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis jumlah kasus korupsi setiap tahunnya menunjukan angka yang cukup tinggi dan sektor yang paling tinggi kasus korupsinya adalah sektor Anggaran Desa.
2. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 kerugian negara akibat korupsi mencapai angka sebesar 18,17 Triliun Rupiah.
3. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Pertumbuhan memperlihatkan bahwa t statistic < t tabel ($-1.578 < 2.11991$), Maka Ketentuannya terima H_0 , artinya bahwa variabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Berdasarkan Hasil uji Investasi (IN) terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK) memperlihatkan bahwa t statistic < t tabel $3.661213 > 2.13145$). Maka Ketentuannya tolak H_0 , artinya bahwa variabel Investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia.
5. Berdasarkan Hasil uji Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Kasus Korupsi (JKK) memperlihatkan bahwa t statistic < t tabel ($-0.400647 < 2.13145$). Maka Ketentuannya terima H_0 , artinya bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia.
6. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Kasus Korupsi di memperlihatkan bahwa t statistic < t tabel ($3.276 > 2.13145$), Maka Ketentuannya tolak H_0 , bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia.
7. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE), Investasi (IN), Pengeluaran Pemerintah (GE) terhadap Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa f statistic < f tabel ($22.09383 > 2.491967$). Maka Ketentuannya tolak H_0 , artinya bahwa Ekonomi (PE), Investasi (IN), Pengeluaran Pemerintah (GE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Aswicahyono, H., & Christia, D. 2017. *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. Centre For Strategic and International Studies. Jakarta
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan E-Views*. Jakarta: Erlangga
- Baiti, A., Naghavi, N., & Fah, B. C. Y. (2017). The impact of environmental regulations, corruption and economic freedom on economic growth: empirical evidence from China. *International Journal of Economics and Finance*, 9(11), 92-99.
- Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005). The economic costs of corruption: A survey and new evidence.
- Gujarati, Damodar. 2003. *"Ekonometrika Dasar"*. Jakarta : Erlangga.
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *"Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi"*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, Gregory. 2006. *"Pengantar Ekonomi Makro"*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

- Indeks Persepsi Korupsi Reformasi Indonesia di akses melalui <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Joniarta, I. W. 2018. *Banalitas Korupsi di Indonesia (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya)*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol.2 No 1, Februari 2018
- Kucoro, Mudrajad. 2014, *Otonomi Daerah Era Baru Pembangunan Daerah* Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Michael.P.Todaro, Stephen C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Edisi kesebelas. Erlangga. Jakarta
- Nawatmi, S. 2016. *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik*. Media Ekonomi dan Manajemen 31 (1)
- Pemerintah Pusat. 1999. Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pengeluaran Pemerintah Indonesia diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Rahayu. 2009. *Sekilas Sejarah Korupsi di Indonesia*. Jurnal Universitas Indonesia. Warta sejarah 8 (14): 20-29
- Suraji. 2008. *Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*. Jurnal Administrasi Kebijakan Publik. 12 (2) : hal 135 - 148
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2012). *Makroekonomi* (Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diakses melalui <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf>
- Marpaung, A. P., Koto, M., Hafiz, M. S., & Hamdani, R. Female Directors and Firm Performance: Evidence of Family Firm in Indonesia.
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2020). Analysis of the Development of Indonesian Palm Oil (cpo) Export Before and After Traders of the United States of America-China. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 1(1), 106-116.
- Januri, J. (2021, November). The Effects of Net Working Capital on Return on Assets in PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 478-486).
- Hafni, R., Sinulingga, N. S., & Hasibuan, L. S. (2021, November). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Jufrizen, J., Farisi, S., Azhar, M. E., & Daulay, R. (2020). Model Empiris Organizational Citizenship Behavior dan Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Medan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(2), 145-165.
- Pohan, M. (2021, November). Analysis of The Role of Management Information Systems in The Decision Making Process at PT. Indonesian Trading Company Medan. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 528-535).
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506-519.
- Sabrina, R. (2021, October). Bertahan Di Tengah Badai Pandemi Covid-19 Dengan Rehabilitasi Mangrove Dan Pemanfaatan Ekonominya. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Hafni, R., Hasibuan, J. S., Muslih, M., & Yusnandar, W. (2020). Model Empiris Online Trust Dan Repeat Purchase Pelanggan Terhadap Situs E-Commerce. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(2), 266-283.
- Rahayu, S. E. (2021, April). ANALISIS PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 455-461).